Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia
E-ISSN: 2964-2493 P-ISSN: 2962-0430
Vol. 3 No. 1 Januari 2024

Analisis Teori-Teori dan Ruang Lingkup Ekonomi Politik Internasional

Ira Meilani Sipahutar[1] Roma Sihol Marito Sitompul[2] Santi Melati Silalahi[3]
Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia[1,2,3]
Email: santysilalahi07@gmail.com[3]

Abstrak

Kajian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan teori-teori ekonomi politik internasional, dan menganalisis ruang lingkup ekonomi politik internasional serta pengaruhnya terhadap perekoomian negara. Metode yang digunakan dalam kajjian ini dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif yang menghasilkan kajian atas suatu fenomena danmenggambarkan berdasarkan studi lteratur dengan memanfaat berbagai referensi dari penelitian sebelumnya. Dalam kajian ini, teori-teori ekonomi politik internasional membuka kelemahan-kelemahan teori lain, sehingga kita dapat melihat dan membedakan sejauh mana kekuatan teori-teori tersebut dalam menjelaskan kecenderungan-kecenderungan ekonomi global. Hal ini mengambarkan bagaimana Ekonomi Politik Internasional membahas masalah pembangunan dan perubahan kenegaraan dan perekonomian nasional menjadi sumber daya yang sangat mendasar bagi negara dan bangsa.

Kata Kunci: Ekonomi, Politik, Internasional

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pada masa sekarang ini, interaksi antara satu negara dengan yang lain semakin mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa urusan ekonomi dalam politik internasional sangat diperlukan. Masalah yang berhubungan dengan ekonomi sangat luas cakupannya dalam pertukaran barang dan jasa dan transaksi ekonomi lainnya. Oleh karena itu, pada skala nasional maupun global, ekonomi memiliki hubungan maupun pengaruh yang kuat dalam bidang politik. Mohtar Mas'oed dalam bukunya Ekonomi Politik Internasional (EPI) tahun 1989/1990 mengatakan bahwa, Ekonomi Politik Internasional merupakan disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara aspek ekonomi dan politik dalam konteks arena internasional. EPI melibatkan studi mengenai interaksi antara masalah ekonomi, seperti inflasi, defisit neraca perdagangan, penanaman modal asing, efisiensi produksi, dan lainnya, dengan urusan politik internasional dan domestik.

Pentingnya memahami hubungan antara dinamika pasar dengan keputusan-keputusan politik di tingkat domestik maupun internasional menjadi fokus utama dalam EPI. Mohtar Mas'oed juga menekankan bahwa studi EPI melibatkan analisis dampak kekuatan pasar dalam ekonomi internasional terhadap kebijakan politik domestik di berbagai negara. Sebagai contoh konkret, gejolak harga minyak dunia ketika Amerika Serikat mengancam Iran menjadi illustrasi nyata bagaimana kebijakan politik suatu negara dapat mempengaruhi ekonomi internasional. Ancaman terhadap pasokan minyak dari Iran memicu kenaikan harga minyak mentah dunia, yang berdampak global termasuk di Indonesia. Gilpin (sebagaimana dikutip dalam Jones 1993:223-224) menyatakan, "Pada satu pihak, politik begitu menentukan kerangka aktivitas ekonomi dan mengarahkannya untuk melayani kepentingan kelompok-kelompok dominan, penggunaan kekuasaan dalam berbagai bentuknya sangat menentukan hakikat suatu sistem ekonomi. Di lain pihak, proses ekonomi itu sendiri cenderung meredistribusikan kekuasaan dan kekayaan, ekonomi merombak hubungan kekuasaan antar kelompok. Pada gilirannya hal

itu merombak sistem politik, sekaligus membentuk struktur hubungan ekonomi yang baru. Jadi, dinamika hubungan internasional di zaman modern pada pokoknya merupakan fungsi interaksi timbal balik antara ekonomi dan politik."

Dengan demikian, Ekonomi Politik Internasional (EPI) merupakan interaksi timbal balik dan dinamis antara upaya pengejaran kekuasaan dan kekayaan dalam konteks hubungan internasional. Pandangan ini melibatkan kompleksitas antara dimensi politik dan ekonomi, menghasilkan suatu paradigma yang melebihi batasan teori ekonomi murni atau politik murni. Sejak Revolusi Industri pada abad ke-16, aspek ekonomi telah memegang peran dominan dalam sistem internasional. Kekuatan dominan ini muncul dari kebutuhan akan bahan mentah, pasar, tenaga kerja, sumber energi, dan teknologi (Frieden dan Lake, 1991: 4). Pasca-Perang Dunia II, muncul persaingan antara blok Barat yang liberalis-kapitalis dan Timur yang sosialis-komunis, tidak hanya dalam bentuk persaingan ideologi politik yang tajam, tetapi juga dalam haluan ekonomi. Meskipun sebagian memandang konflik ini sebagai masalah ekonomi, namun hakikatnya memengaruhi fundamental sistem politik internasional. Dampaknya terlihat dalam pembentukan organisasi-organisasi kerjasama internasional seperti PBB, ASEAN, APEC, IMF, Bank Dunia, OPEC, GATT, IBRD, ADB, dan lainnya, yang melibatkan pelembagaan sistem ekonomi internasional.

Perkembangan pemikiran dalam bidang EPI juga menjadi hal yang menarik untuk dijelajahi. Dari zaman Klasik Baru hingga zaman Keynesian, pemikiran ekonomi politik mengalami evolusi dengan munculnya tokoh-tokoh seperti Herman Heinrich, Karl Merger, Eugen von Bohn Bawerk, dan Friedrich von Wieser. Berbagai teori EPI, seperti Merkantilisme, Liberalisme Ekonomi, dan Marxisme, memberikan pandangan yang berbeda mengenai hubungan antara ekonomi dan politik. Dalam era globalisasi ekonomi, perdebatan semakin intens, terutama terkait perubahan dalam dinamika ekonomi global. Bagaimana teori-teori EPI menghadapi tantangan globalisasi dan bagaimana perubahan tersebut memengaruhi pandangan terhadap hubungan antara ekonomi dan politik menjadi topik yang menarik untuk dijelajahi lebih lanjut. Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana teori-teori dan Ruang Lingkup Ekonomi Politik Internasional.

Landasan Teori

Gilpin (1987) mengatakan bahwa, dalam ekonomi politik internasional terlihat jelas adanya pertentangan antara meningkatnya interdependensi dari ekonomi internasional dengan keinginan negara untuk mengatur ketergantungan ekonomi dan otonomi politiknya karena pada saat yang bersamaan, negara menginginkan keuntungan yang maksimal dari perdagangan bebas yang dilakukan dengan negara lain, tetapi di sisi lain negara juga ingin melindungi otonomi politik, nilai kebudayaan, serta struktur sosial yang dimilikinya. Studi Ekonomi Politik Internasional (EPI) menurut Thomas Oatley (2006) adalah studi mengenai bagaimana kepentingan ekonomi dan proses politik berinteraksi membentuk kebijakan pemerintah. Ia membagi studi Ekonomi Politik Internasional (EPI) ke dalam empat isu sentral:

1. Sistem Perdagangan Internasional. Dalam hal ini, para akademisi mendiskusikan bagaimana pertarungan politik antara entitas yang memiliki kekuatan dominan dan yang lebih lemah membentuk penciptaan, implementasi, dan dampak dari sistem yang terfokus pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) serta kerangka perdagangan regional yang berkembang.
2. Sistem Moneter Internasional. Dalam lingkup ini, para akademisi menyoroti dampak pertarungan politik antara pihak yang dominan dan yang lebih lemah terhadap penciptaan, operasionalisasi, dan konsekuensi dari sistem moneter internasional. Sistem ini memberikan kebebasan transaksi ekonomi bagi masyarakat yang berada di negara-negara yang berbeda.

3. Perusahaan Multinasional (MNCs). Dalam konteks isu ini, akademisi membahas bagaimana pertarungan politik antara kekuatan yang berbeda memengaruhi aktivitas perusahaan multinasional (MNCs) dan dampaknya terhadap upaya regulasi pemerintah.
4. Pembangunan Ekonomi. Dalam lingkup isu ini, perhatian akademisi difokuskan pada strategi-spesifik yang diadopsi oleh pemerintah negara-negara berkembang. Mereka berusaha menjelaskan mengapa setiap pemerintah mengambil pendekatan ekonomi yang berbeda dalam upaya pembangunan mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena dengan merancang penelitian ini menggunakan metode perpustakaan atau studi lteratur dengan memanfaat berbagai referensi dari penelitian sebelumnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan peristiwa atau fenomena ilmiah. Pengumpulan data dilakukan dengan melihat data-data yang diperlukan, mencatat, dan menganalisis teori-teori dan ruang lingkup ekonomi politik internasional. Metode penelitian sekunder membantu peneliti mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan sebagai dasar penyelidikan lebih lanjut, dengan sumber data dari perpustakaan umum, website, hasil survei, dan sebagainya. Bahan penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder, dan tersier. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, dan kasus hukum terkait. Bahan hukum tersier seperti kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel dan internet. Semua itu memberikan landasan penelitian yang kokoh dan komprehensif untuk memahami dan menggali lebih dalam konteks penelitian ini yaitu teori-teori dalam politik internasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Teori Perdagangan Liberal

Tokoh aliran liberal, Adam Smith menyatakan gagasannya tentang keunggulan absolut *(absolute advantage),* di mana kunci dari kekuatan dan kekayaan suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi dan sarana untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi itu adalah perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional harus diciptakan pembagian kerja *(division of labour)* atau spesialisasi, yang mana setiap negara menciptakan produksinya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Aktifitas perdagangan bebas akan membawa keuntungan bagi semua partisipan, sebab perdagangan ini akan menjadikan terjadinya spesialisasi dan spesialisasi akan meningkatkan efisiensi, dan secara otomatis juga meningkatkan produktifitas. Keunggulan komparatif dikemukakan tokoh David Ricardo, bahwa perdagangan internasional yang seimbang dan berkeadilan akan terwujud jika masing-masing negara menekankan pada dimensi keunggulan komparatif. Hal ini bermakna bahwa negara-negara yang menghasilkan produk tertentu dengan biaya relatif rendah akan memiliki keunggulan atas produk tersebut dalam perdagangan internasional. Suatu negara meskipun memiliki keunggulan absolut atas suatu produk, bisa saja tidak menjadi eksportir produk tersebut, karena biaya komparatifnya lebih mahal daripada bila diproduksi negara lain. Hal ini bisa berasal dari faktor produksi tertentu misalnya; tenaga kerjanya yang murah, ketersediaan bahan mentah, ataupun teknologinya, sehingga suatu negara mencapai tahap efisiensi yang lebih, dari negara lain.

Teori Perdagangan Nasionalis

Teori perdagangan nasionalis disebut juga sebagai teori merkantilis. Kepentingan nasional adalah tujuan akhir dari kegiatan perdagangan. Teoritisi perdagangan nasionalis

adalah Friedrich yang mengemukakan tentang pentingnya campur tangan negara dalam aspek ekonomi. Keberhasilan ekonomi tidak mungkin dicapai tanpa adanya campur tangan secara politik (Brown 2001: 156-157). Dalam pandangan List, sebuah negara yang kuat hanya bisa dicapai melalui nasionalisme ekonomi dan perdagangan. Hal tersebut bisa ditempuh melalui berbagai cara seperti: Proteksi, pengenaan tarif tinggi atas barang impor, dumping, perlindungan buruh, dan lain-lain. Di sinilah negara (sebagai institusi politik) memiliki peranan penting. Singkatnya, perekonomian tunduk pada komunitas politik, khususnya pemerintah. Pemerintah bertanggungjawab penuh untuk memajukan kepentingan nasional dengan cara apapun. Merkantilisme melihat kekuatan ekonomi dan kekuatan politik militer sebagai tujuan yang saling melengkapi, bukan saling bersaing, dalam lingkaran arus balik positif. Pencapaian kekuatan ekonomi mendukung pengembangan kekuatan politik dan militer negara dan kekuatan politik dapat meningkatkan dan memperkuat ekonomi negara. Kaum merkantilis menyatakan bahwa perekonomian seharusnya tunduk pada tujuan utama peningkatan kekuatan negara, politik harus di utamakan daripada ekonomi. Tetapi isi dari kebijakan-kebijakan spesifik yang direkomendasikan untuk menjalankan tujuan tersebut telah berubah sepanjang waktu. Merkantilisme mengganggap perekonomian tunduk pada komunitas politik dan khususnya pemerintah. Aktivitas ekonomi di lihat dalam konteks yang lebih besar atas peningkatan kekuatan negara. Organisasi yang bertanggung jawab dalam mempertahankan dan memajukan kepentingan nasional yang di sebut negara, memerintah di ats kepentingan ekonomi swasta. Kekayaan dan kekuasaan adalah tujuan yang saling melengkapi bukan saling bertentangan. Ketergantungan ekonomi pada negara-negara lain seharusnya di hindari sejauh mungkin. Ketika kepentingan ekonomi dan keamanan pecah, kepentingan keamanan mendapat prioritas.

Teori "*Dual Economy*"

Teori *dual economy* atau dualisme ekonomi menyatakan bahwa setiap gejala perekonomian domestik maupun internasional harus dianalisis dari dua sektor yang satu sama lain secara relatif independen. Pertama adalah sektor modern yang progresif yang dicirikan oleh suatu integrasi dan efisiensi tingkat tinggi. Kedua adalah sektor tradisional yang yang diwarnai oleh sebuah keterbelakangan cara-cara produksi dan swasembada lokal. Menurut para penganut *dual economy* proses evolusi ekonomi (dalam lingkup *domestic* maupun internasional) dikendalikan oleh kompetisi pasar, mekanisme harga, efisiensi produksi, dan maksimalisasi kekayaan. Kelemahan dari teori ini, cenderung mengeksternalisasikan kesalahan pembangunan yang berlaku di negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju. Seolah-olah seluruh dampak negatif pembangunan di negara-negara berkembang disebabkan oleh kebijakan jahat yang sengaja dirancang oleh negara-negara maju. Padahal banyak sekali keterbelakangan yang wujud di negara-negara pinggiran (berkembang) disebabkan oleh faktorfaktor internal mereka sendiri, seperti: Struktur sosial, sistem politik, tingkat korupsi, orientasi budaya, tingkat pendidikan, lemahnya institusi, motivasi kemajuan, dan lain.

Teori Sistem Dunia Modern (MWS)

Teori MWS menyatakan bahwa dunia moderen hanya dapat dipahami sebagai sistem global dengan suatu *division of labor* tunggal dan sistem budaya. Kemajuan yang dicapai di wilayah-wilayah pusat secara bersamaan justru menciptakan kemiskinan serta ke timpangan di negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang terjebak dalam siklus atau pusaran keterbelakangan. Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan lebih disebabkan oleh faktor internal atau faktor-faktor yang terdapat di dalam negara yang bersangkutan. Ada banyak variasi dan teori yang tergabung dalam kelompok teori ini antara lain adalah: Teori yang

menekankan bahwa pembangunan hanya merupakan masalah penyediaan modal dan investasi. Teori ini biasanya dikembangkan oleh para ekonom. Pelopor teori antara lain Roy Harrod dan Evsay Domar yang secara terpisah berkarya namun menghasilkan kesimpulan sama yakni: pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Menurut teori MWS, ekonomi internasional merupakan arena pertarungan kepentingan antara negara-negara pusat yang maju dengan negara-negara pinggiran yang lemah dan terbelakang, dalam wujud penghisapan, yang menyebabkan negara-negara terbelakang terhalang kemajuannya baik secara ekonomi maupun politik. Pembagian kerja internasional secara langgeng telah menempatkan negara-negara berkembang selalu pada posisi tergantung kepada negara-negara maju. Melalui kemampuan ekonomi, jenis produksi, teknologi dan strategi perdagangan yang diciptakan sedemikian rupa, negara-negara pusat (maju) menikmati aliran surplus perdagangan yang secara bersamaan memiskinkan negara-negara pinggiran (berkembang).

Teori Stabilitas Hegemoni

Hegemoni merupakan suatu usaha sistematik dari kelas yang berkuasa untuk menanamkan pahaman dominannya agar tetap berkuasa dengan cara menanamkan keyakinan-keyakinan tertentu ke dalam pikiran dan cara hidup masyarakat (Brown 2001: 188). Menurut Gramsci, hegemoni bukanlah merupakan hubungan dominasi dengan menggunakan kekerasan, melainkan satu hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologi yang dibina berdasarkan mekanisme konsensus. Para teoritisi stabilitas hegemonis berpendapat bahwa semua negara berkepentingan untuk menjaga agar struktur kekuatan hegemonis tidak runtuh, karena hal tersebut akan menimbulkan penurunan rezim internasional yang kuat dan stabil. Karena jika struktur kekuatan hegemonis runtuh maka norma-norma, aturan-aturan, dan kerangka ekonomi liberal akan berantakan juga (Keohane 1988: 64).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas kita mengetahui bahwa terdapat beberapa teori dan pandangan tentang ekonomi politik internasional, yaitu Teori Perdagangan Liberal; Teori Perdagangan Nasionalis; Teori *"Dual Economy";* Teori Sistem Dunia Modern (MWS); Teori Stabilitas Hegemonis. Teori-teori tersebut telah menunjukkan aspek penting hubungan ekonomi dan politik yang memiliki keunggulan masing-masing. Teori-teori tersebut juga membuka kelemahan-kelemahan teori lain, sehingga kita dapat melihat dan membedakan sejauh mana kekuatannya dalam menjelaskan kecenderungan-kecenderungan ekonomi global. Ekonomi Politik Internasional membahas masalah pembangunan dan perubahan kenegaraan dan perekonomian nasional menjadi sumber daya yang sangat mendasar bagi negara dan bangsa. Ketika perekonomian nasional berada dalam proses yang terintegrasi ke dalam perekonomian dalam konteks glonalisasi ekonomi, dasar keseluruhan bagi kenegaraan yang modern berubah dengan cara yang kritis.

DAFTAR PUSTAKA

Adiputra, H. C. (2014). Makalah Ekonomi Politik Internasional.

Alputra, S. F. (2016). Ekonomi Politik Internasional transformasi isu dan teori. *Yogyakarta : Leutiaprio*, *August 2016*, 3–4.

Budiono, I. (1997). *Ekonomi Politik internasional MNC* (pp. 1–14).

Maiwan, M. (2015). Teori-Teori Ekonomi Politik Internasional Dalam Perbincangan: Aliran dan Pandangan. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi. Vol 15 No 1*

Maslihan. (2019). Teori Pendekatan Ekonomi Dalam Politik Internasional. *Jurnal Parameter Stie Tribuana. Vol. 4 No. 2*